

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD SCHOOL GOVERNANCE**

**Siti Fatimatuazzahrah<sup>1</sup>, Ikang Murapi<sup>2</sup>, Layali Ihyani<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bumigora<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [sitifatimatuazzahrazahra36@gmail.com](mailto:sitifatimatuazzahrazahra36@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengelolaan dana (Bantuan Operasional Sekolah) BOS merupakan tanggung jawab penting bagi setiap satuan pendidikan karena berkaitan dengan penggunaan dana publik yang harus dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip *good governance*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang diterapkan sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di SDN 2 Banyumulek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sekolah terbuka dalam penggunaan anggaran dan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, serta komite sekolah dalam pelaporan dan pengawasan. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. SDN 2 Banyumulek telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, yang merupakan bagian penting dari upaya mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS, sebagaimana dibuktikan oleh transparansi informasi terkait penggunaan dana, keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan yang sistematis dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance*

**ABSTRACT**

The management of School Operational Assistance (SOA) funds is an important responsibility for every educational unit because it is related to the use of public funds that must be carried out efficiently, transparently, and responsibly. This study focuses on the implementation of the principles of good governance. The approach used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis process was carried out using qualitative descriptive analysis methods. The purpose of this study is to examine how accountability and transparency in fund management are implemented as a step to realize good school governance. This research was conducted directly at SDN 2 Banyumulek. The results show that fund management has been running quite well, especially in terms of transparency and accountability. The school is open in budget use and involves the principal, treasurer, teachers, and the school committee in reporting and supervision. This reflects the school's commitment to the principles of good governance, namely transparency, accountability, and participation. SDN 2 Banyumulek has demonstrated a strong commitment to implementing accountability principles, which are an important part of efforts to achieve good governance in the management of BOS funds, as evidenced by the transparency of information related to the use of funds, the involvement of various parties in the planning and evaluation process, and systematic and accountable reporting.

**Keywords:** *BOS Fund Management, Accountability, Transparency, Good Governance*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah sedang menggalakkan pendidikan wajib sebagai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Untuk mendukung pelaksanaannya, biaya operasional sekolah harus dialokasikan, tidak hanya kepada orang tua. Pemerintah memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola anggaran mereka secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dengan tetap mematuhi kerangka peraturan yang berlaku. Sebelumnya, anggaran pendidikan seringkali tidak tepat sasaran atau tidak efisien. Program BOS dirancang untuk mentransfer dana langsung ke sekolah, memastikan penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Ketersediaan dana operasional memungkinkan sekolah untuk mendukung berbagai program pengembangan kompetensi guru dan siswa, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, serta menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik.

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran (Fitri, A. 2014). Di antara beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan adalah pengelolaan dana bantuan. Pemantauan kemajuan kualitas satuan pendidikan dimungkinkan dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi, yang dapat mendorong keunggulan dalam lembaga pendidikan (Naslikhah dkk., 2022). Efektivitas adalah “suatu ketetapan tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan.” Dengan demikian yang dimaksud dengan keefektifan adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan usaha kerja sama (Andi dkk., 2015).

Program ini diharapkan pemerintah menyediakan dana untuk biaya operasional satuan pendidikan dasar yang tidak dapat diganti rugi dalam rangka melaksanakan program wajib belajar. Tujuan program adalah untuk membantu orang tua membiayai pendidikan nasional sembilan tahun yang berkualitas tinggi bagi anak-anak mereka. Siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menerima pendidikan gratis terkait biaya sekolah, dan siswa kurang mampu tidak diwajibkan membayar uang sekolah apa pun. Perkalian jumlah satuan dana daerah dengan jumlah siswa menghasilkan alokasi dana BOS (Batubara, 2023). Pengeluaran keuangan yang tidak efisien, penyaluran dana yang didasarkan pada ketersediaan anggaran pelaksanaan alih-alih kebutuhan sekolah, dan kegagalan membayar gaji guru dan staf tepat waktu merupakan contoh umum pengelolaan dana yang tidak efektif (Maharti & Fahrullah, 2021). Faktor lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat akibat ketidakmampuan mereka dalam melakukan pengawasan karena tidak memiliki akses terhadap informasi anggaran. Selain permasalahan diatas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam BOS namun, penggunaan dana tersebut seharusnya melibatkan wali murid sejak perencanaan hingga pelaporan (Fauzan, 2014). Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan Program dana BOS adalah pengelolaan dana yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal dan juga menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparansi.

Hasil penelitian mengenai pengelolaan dana BOS menunjukkan temuan yang bervariasi bahkan saling bertentangan. Penelitian (Widiatmika, 2015) mengungkapkan berbagai permasalahan, seperti pengelolaan dana BOS yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis), dikelola secara tertutup oleh kepala sekolah dan bendahara, tidak transparan, serta menyingkirkan peran Komite Sekolah. Sebaliknya, Yunita & Perdanawati (2020) menyatakan bahwa prosedur pengelolaan dana BOS di sekolah yang ditelitinya telah sesuai dengan ketentuan, transparan, dan melibatkan warga sekolah melalui rapat pleno. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sine et al., (2021) yakni pengelolaan dana BOS di sekolah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, kondisi, atau situasi tertentu (Paramita et al., 2021). Metode kualitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi yang berbeda serta merangkum informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang berlangsung sepanjang proses penelitian hingga selesai. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Banyumulek. Berdasarkan observasi awal, terdapat permasalahan yakni terkadang terjadi kekeliruan dalam pembuatan laporan realisasi penggunaan dana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga komponen dalam analisis data yakni : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Metode kualitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi yang berbeda serta merangkum informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yang berlangsung sepanjang proses penelitian hingga selesai. Proses wawancara dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu kepala sekolah, bendahara serta guru. Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh peneliti, proses pengamatan didasarkan pada pedoman yang telah disusun dalam lembar pengamatan. Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012: 266). Moleong (2016: 324) menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Menurut (Bastian, 2006) ada 3 cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi kepada publik yaitu:

- 1) Publikasi adalah pemberitahuan atau pengumuman untuk public yang berbentuk foto, gambar, teks atau dokumen lainnya.
- 2) Presentasi merupakan pidato sebagai bentuk komunikasi untuk mengajukan topik, pendapat atau informasi kepada orang lain.
- 3) Pengiriman Surat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 2 Banyumulek

Transparansi dapat terwujud dengan baik apabila terdapat tanggung jawab yang tinggi dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang menerima amanah tersebut. Keduanya harus menunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Secara umum, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam berbagai tahapan proses, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana atau amanah yang telah diberikan kepada suatu pihak tertentu. Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan

informasi yang akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak diskriminatif dalam hal pelaporan penggunaan dana, khususnya dalam konteks penyelenggaraan suatu organisasi atau lembaga.

Sekolah ini telah secara rutin menyusun Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) setiap tahunnya. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, yaitu Bapak Salikin selaku Kepala Sekolah, yang ketika ditanya *'Apakah sekolah membuat ARKAS?'* memberikan informasi bahwa penyusunan ARKAS memang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah.

*"Ya, setiap tahun rutin dibuatkan ARKAS. Sebelum dibuatkannya ARKAS, sekolah mendata dulu apa saja yang dibutuhkan sekolah dan mendahulukan apa saja yang jadi prioritas, lalu disusun menjadi rencana pendapatan dalam belanja sekolah."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sekolah menjalankan proses perencanaan anggaran secara sistematis dan partisipatif. Langkah awal dengan melakukan pendataan kebutuhan sekolah, kemudian menetapkan prioritas, hingga akhirnya dituangkan dalam rencana belanja, mencerminkan adanya kesadaran pihak sekolah terhadap pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan keuangan.

Selain proses penyusunannya yang dilakukan secara terstruktur, keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan ARKAS juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi, yang merupakan bagian dari *good governance*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang sama, yaitu Bapak Salikin selaku Kepala Sekolah, ketika ditanya *'Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan ARKAS?'*, diperoleh informasi bahwa penyusunan ARKAS melibatkan sejumlah pihak terkait di lingkungan sekolah, sesuai dengan prinsip partisipatif dalam perencanaan anggaran.

*"Semua guru, komite terlibat, dan juga kami meminta pendapat dari murid apa saja kekurangan dan kebutuhan, tapi tidak langsung kita rapat melainkan dari hasil wawancara setiap kelas keadaan kelasnya masing-masing apa yang kurang."*

Pernyataan diatas diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah, Bapak Mansyur, yang menjawab pertanyaan *'Apakah Bapak selaku komite sekolah terlibat dalam pembuatan ARKAS?'*. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa beliau memang dilibatkan dalam proses penyusunan ARKAS, yang menunjukkan adanya partisipasi aktif komite sekolah sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran sekolah.

*"Ya, saya selaku komite sekolah selalu ikut terlibat pas rapat dengan para guru dalam pembuatan ARKAS yang dilakukan sekolah."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan ARKAS di sekolah ini tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala sekolah atau bendahara saja, melainkan melibatkan berbagai unsur, termasuk seluruh guru, komite sekolah, bahkan siswa. Keterlibatan siswa sebagai penerima manfaat langsung dari penggunaan dana menunjukkan bahwa sekolah membuka ruang dialog dua arah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dari perspektif berbagai pihak. Pelibatan ini memperkuat penerapan prinsip partisipasi yang merupakan bagian dari dimensi *good governance*, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan dan perencanaan. Selain itu, hal ini memperlihatkan adanya upaya akuntabilitas sosial, di mana sekolah tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah, tetapi juga kepada warga sekolah sebagai pemangku kepentingan langsung. Keterbukaan dalam penyusunan ARKAS, yang melibatkan guru, komite, dan siswa, menjadi salah satu praktik nyata penerapan *good governance* di tingkat satuan pendidikan dasar.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sekolah ini memang tidak secara resmi membentuk tim khusus untuk belanja barang. Namun demikian, pelaksanaannya tetap mengedepankan kerja kolektif dengan melibatkan seluruh guru. Hal ini



diperkuat oleh pernyataan salah satu komisioner dewan guru, Bapak Heri Wardani, yang menanggapi pertanyaan 'Apakah semua guru terlibat dalam pembuatan ARKAS?'.  
"Iya semua terlibat, sebelum dilakukan ARKAS kami semua melakukan rapat guru disana kami ditanya kebutuhan apa saja kemudian disusun di ARKAS"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelum ARKAS disusun, sekolah terlebih dahulu menghimpun usulan kebutuhan dari setiap guru melalui rapat bersama. Forum ini menjadi wadah bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan dana BOS. Setelah itu, hasil diskusi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan ARKAS secara menyeluruh. Keterlibatan seluruh guru beserta komite dalam proses ini mencerminkan upaya nyata dalam penerapan transparansi pada pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran. Hal ini juga menunjukkan bentuk akuntabilitas internal, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan kebutuhan riil yang telah disepakati bersama.

### Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu bentuk penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah di SDN 2 Banyumulek adalah melalui proses penggunaan dana BOS. Proses ini dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara sistematis dan transparan kepada pemerintah sebagai pemberi dana. Pelaporan dana dilaksanakan oleh bendahara sekolah dalam dua bentuk, yaitu secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah, serta secara tertulis dalam bentuk dokumen fisik.

Dalam pelaksanaannya, bendahara tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh Tim sekolah yang terdiri dari unsur-unsur internal yang memahami pengelolaan dana. seluruh proses pelaporan tersebut diawasi dan diketahui secara langsung oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, pengelolaan dana mencerminkan prinsip akuntabilitas yang kuat, di mana setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat luas.

Penyusunan ARKAS jangka waktu satu tahun ke depan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya tanggung jawab yang jelas dari setiap pelaksana kegiatan yang telah direncanakan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Dengan demikian, proses perencanaan telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Sementara itu, transparansi dalam pelaksanaan anggaran tercermin melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, dalam menjalankan Kegiatan yang disarankan. Mereka membantu menyusun laporan pertanggungjawaban yang didukung oleh tanda terima atau bukti nyata, serta mengalokasikan dana sesuai dengan persyaratan program sekolah. pengeluaran. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, yaitu Bapak Salikin selaku Kepala Sekolah, saat diberikan pertanyaan 'Apakah sekolah ini membentuk tim manajemen BOS dalam belanja barang?', diperoleh informasi sebagai berikut:

*"Di sekolah ini semua guru terlibat dalam pembelanjaan barang. Karena sebelum melakukan pembelian barang dilakukan rapat terlebih dahulu dan dibahas siapa saja yang mendapat bagian dalam pembelanjaan. Pembelanjaan barang kecil dengan dana di bawah 10 juta hanya dilakukan oleh para guru, sedangkan kepala sekolah terlibat dalam pembelanjaan barang dalam jumlah besar seperti pembangunan. Itu harus diawasi kepala sekolah langsung karena jumlahnya besar."*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, yang dibuktikan melalui dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban Dana BOS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengadaan barang dilakukan secara kolektif dan terbuka. Sekolah mengutamakan prinsip musyawarah melalui rapat bersama sebelum melakukan pembelian barang. Guru-guru diberikan tanggung jawab untuk menangani pembelanjaan dalam skala kecil, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar, seperti pembangunan fisik sekolah, berada di bawah pengawasan langsung Kepala Sekolah. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana.

Konteks penelitian ini, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap penyusunan laporan penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun secara tertib melalui pembukuan pengelolaan dana yang mencakup berbagai komponen sesuai dengan regulasi tersebut. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Suwandy, yang menjawab pertanyaan,

*'Ke mana saja laporan dana BOS dilaporkan? Apakah hanya dilaporkan di sekolah saja?'*, dan menyampaikan bahwa

*"Laporan dana BOS dilaporkan ke dinas dan pendamping BOS yaitu yang mendampingi di dinas dan memeriksa dana BOS nya apakah sudah benar atau tidak, setelah selesai dari pendamping di buat SPJ baru dilaporkan. Tahapannya dari sekolah, pendamping BOS setelah pendamping di ACC baru dilaporkan ke dinas baik via online ataupun laporan pembukuan"*

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan laporan ini dilaksanakan oleh bendahara BOS dengan dukungan tim, dan selalu dalam pengawasan kepala sekolah selaku penanggung jawab utama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah dan bendahara BOS bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Penerapan *Good School governance* Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Penerapan prinsip-prinsip *good school governance* dalam pengelolaan dana telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pengelolaan dana tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mengarah pada terciptanya tata kelola sekolah yang lebih jujur, terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari adanya praktik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengawasan yang berjalan secara efektif. Secara khusus, partisipasi masyarakat mulai terlihat melalui keterlibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, diketahui bahwa perwakilan orang tua siswa, yang tergabung dalam komite sekolah, turut dilibatkan dalam rapat bersama pihak sekolah. Mereka memberikan masukan serta menyetujui rencana anggaran yang akan dijalankan. Pernyataan Bendahara BOS yaitu bapak Ahmad Suwandy menegaskan hal ini:

*"Ya, wali murid juga terlibat dalam pengelolaan dana BOS, karena perwakilan mereka adalah komite sekolah. Komite ikut dalam rapat bersama pihak sekolah, memberikan masukan, dan menyetujui rencana anggaran yang dibuat."*

Hal ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah sangat penting sebagai perwakilan resmi wali murid dalam pengelolaan dana. Komite tidak hanya terlibat dalam proses rapat dan pengambilan keputusan bersama pihak sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan informasi bagi seluruh wali murid. Dengan kata lain, komite menjadi penghubung yang menyampaikan aspirasi, masukan, serta hasil keputusan pengelolaan dana kepada para wali murid, sehingga partisipasi masyarakat dapat terwujud secara tidak langsung namun tetap bermakna.

Penerapan prinsip-prinsip *good school governance* tersebut tidak hanya tercermin secara teoritis, tetapi juga terlihat nyata dalam praktik pengelolaan dana di lingkungan sekolah. Transparansi dalam pengelolaan dana diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada para guru, komite sekolah, dan bahkan siswa. Sekolah rutin melakukan rapat bersama sebelum penyusunan RKAS, seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru. Informasi penggunaan dana juga terbuka untuk ditinjau kembali oleh warga sekolah dalam rapat evaluasi tahunan, termasuk melalui sistem Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

## Pembahasan

Dalam penelitian ini, akuntabilitas dimaknai sebagai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh proses pengelolaan dana berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum, manajemen keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diverifikasi oleh Inspektorat tanpa temuan penyimpangan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam koordinasi, seperti kelalaian dalam pelaporan pajak. Meski demikian, laporan keuangan disusun dan disampaikan sesuai petunjuk teknis yang berlaku, sehingga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dapat dijalankan secara optimal.

Dari aspek pembagian tugas, proses perencanaan dana dinilai sudah berjalan baik, terlihat dari pembagian tanggung jawab yang jelas antar pelaksana kegiatan serta keterlibatan seluruh elemen sekolah dalam penyusunannya. Partisipasi kolektif ini memungkinkan sekolah untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan secara transparan dan sistematis.

Hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019. Hal ini tercermin dalam penggunaan aplikasi ARKAS, pencatatan keuangan, pengarsipan bukti transaksi, serta pelaporan realisasi anggaran kepada instansi terkait. Tidak terdapat pengaduan dari pihak manapun terkait pengelolaan dana, yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari pemerintah terhadap sekolah tersebut.

SDN 2 Banyumulek telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, yang merupakan bagian penting dari upaya mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana, sebagaimana dibuktikan oleh transparansi informasi terkait penggunaan dana, keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan yang sistematis dan akuntabel. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, dan uraian di atas mengarah pada kesimpulan bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar audit yang berlaku (Sine et al., 2021). Berdasarkan temuan penelitian, sekolah telah berhasil menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, sebagaimana dibuktikan oleh jenis akuntabilitas yang mematuhi kriteria teknis BOS untuk pihak-pihak yang terhubung. Kesimpulan serupa dicapai oleh WidiAmin et al., (2022), yang melaporkan bahwa SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram telah menerapkan prinsip akuntabilitas untuk dana dengan cara yang cukup baik dan sejalan dengan indikator akuntabilitas. Temuan penelitian Suryadi et al., (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di bidang perencanaan Memanfaatkan dana BOS Reguler sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS

Reguler, akuntabilitas dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Widiatmika (2015), yang menemukan bahwa pengelolaan dana BOS SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya masih belum memenuhi semua persyaratan akuntabilitas publik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS telah berjalan dengan baik di beberapa sekolah, termasuk SDN 2 Banyumulek. Namun, masih terdapat perbedaan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas tidak selalu merata di setiap

satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengawasan, agar seluruh sekolah dapat mencapai standar akuntabilitas yang optimal dan konsisten dalam pengelolaan dana BOS.

Prinsip transparansi menekankan keterbukaan informasi terkait sumber dana, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal sekolah, transparansi diterapkan sejak tahap perencanaan anggaran. Guru dan komite sekolah terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan sekolah, sementara pandangan siswa juga dikumpulkan melalui wawancara perwakilan kelas untuk memperoleh data yang spesifik dan mendalam. Dalam penyusunan RKAS, Tim Manajemen BOS melibatkan seluruh guru dan komite, yang diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan siswa sebagai dasar perencanaan. Proses ini berlangsung secara terbuka, dengan komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan wali murid, memastikan informasi tetap tersampaikan meskipun wali murid tidak terlibat langsung.

Kebijakan transparansi ini mendorong kerja sama antara sekolah, komite, dan orang tua, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah menyatakan bahwa upaya ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi telah mengikuti ketentuan juknis BOS. Keterlibatan aktif guru dan komite sekolah dalam proses anggaran dan pelaporan menunjukkan penerapan prinsip ini secara konsisten.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di SDN 2 Banyumulek telah mengikuti aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya keterlibatan antara guru serta komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggung jawaban, hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dengan teknik penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian sebelumnya yaitu, Amin et al., (2022) yang menyatakan bahwa dengan penerapan transparansi penggunaan dana BOS pada SDN 7 Mataram, SDN 12 Mataram, dan SDN 36 Mataram dikelola secara terbuka dan melibatkan orang tua wali, guru, dan komite dalam penyampaian informasi pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian dari Yunita & Perdanawati (2020) menunjukkan hasil yang sama yaitu transparansi berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAM sebagai perencanaan dana BOS, kesesuaian penggunaan dana dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan realisasinya. Namun hasil dari penelitian Sine et al., (2021) menunjukkan hal yang berbeda yakni penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS Di Kota Kupang belum berjalan dengan baik karena masih adanya kekurangan pada tahap publikasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam penelitian pada umumnya telah diterapkan dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa temuan dalam penelitian sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat sejumlah peneliti yang menyampaikan pendapat berbeda, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pelaksanaan prinsip transparansi tersebut belum sepenuhnya konsisten atau belum mencapai standar yang diharapkan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik internal (guru, kepala sekolah) maupun eksternal (komite sekolah), dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana BOS, proses perencanaan melalui aplikasi ARKAS melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keputusan yang diambil lebih objektif dan mencerminkan kebutuhan nyata.

Komite sekolah memainkan peran penting sebagai penghubung antara sekolah dan wali murid, memperkuat objektivitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sekolah. Selain itu, siswa juga dilibatkan melalui wawancara informal untuk menggali kebutuhan kelas secara langsung. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat prinsip transparansi

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan



dan akuntabilitas, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengelola dana. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi telah diterapkan secara baik. Seluruh elemen sekolah menunjukkan kerja sama yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi dalam tata kelola sekolah telah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari unsur internal sekolah seperti kepala sekolah dan guru, maupun dari unsur eksternal seperti komite sekolah. Temuan ini diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, yang menunjukkan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program sekolah, termasuk dalam pengelolaan dana.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN 2 Banyumulek sudah berjalan baik. Sekolah terbuka dalam penggunaan dana, melibatkan berbagai pihak yaitu, Kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah yang mewakili seluruh wali murid aktif terlibat dalam perencanaan dan evaluasi, serta menyusun laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar pemeriksaan. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah dalam menerapkan prinsip good school governance, yakni tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di SDN 2 Banyumulek efektif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N., W., Indriani, E., & Mariadi, Y., (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Andi, M., AR, M., & Usman, N. (2015). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie, 1, 53-63.
- Bastian, I. (2014). Modul 1: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Eks14207
- Batubara, T. B. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(2), 138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>
- Fauzan, F. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 10(3), 158. <https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.776>
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Bahana Manajemen Pendidikan*, 2 (1), 33-831.
- Maharti, R. K., & Fahrullah, A. (2021). Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 207–218. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p207-218>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naslikhah, S. A., Sukandani, Y., & Ardhiani, M. R. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN Sawocangkring,
- Copyright (c) 2025 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

- Wonoayu, Sidoarjo. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 3(3), 111-116.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). Metode penelitian kuantitatif.
- Prastowo, A. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925>
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 855–865. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46493>
- Widiatmika, K. P. (2015). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Di Sekolah (Studi Kasus Pada Smpn 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, Kalimantan Tengah). *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Yunita, R., & Perdanawati, L. P. V. I. (2020). Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Klungkung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 6(2), 238–253. [https://doi.org/10.47329/jurnal\\_mbe.v6i2.434](https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v6i2.434)